

Judul : DPR Menyerahkan ke Pemerintah
Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

GEDUNG BARU

DPR Menyerahkan ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan sepenuhnya perencanaan hingga pembangunan gedung baru DPR kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan penyerahan tersebut, anggota DPR dijamin tak terlibat dalam pembangunannya.

Pembangunan gedung baru DPR tersebut besar kemungkinan baru akan dapat terlaksana setelah DPR bersama pemerintah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Rabu (25/10). APBN 2018 mencakup di antaranya alokasi anggaran gedung baru DPR sebesar Rp 601 miliar.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan se usai Rapat Paripurna DPR mengatakan, sejak saat APBN 2018 masih pembahasan, pimpinan DPR sudah sering menyampaikan kepada Kementerian Keuangan bahwa segala urusan pembangunan gedung baru DPR diserahkan kepada pemerintah.

Ini termasuk dialokasikan atau tidaknya anggaran untuk gedung baru dalam APBN 2018, hingga perencanaan dan pembangunannya. "Kami menyerahkan penuh kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Surat dan dokumen lain yang dibutuhkan sudah di-



**Kapasitas bangunan
diperkirakan
menampung 800 orang.
Namun, saat ini, jumlah
orang yang beraktivitas
di gedung tersebut
mencapai 5.000 orang.**

siapkan Sekretariat Jenderal DPR," ujar Taufik.

Sikap yang diambil DPR dilakukan untuk menepis pandangan bahwa keinginan mereka yang besar untuk membangun gedung baru DPR itu akibat ingin memperoleh jatah anggaran pembangunan gedung. "Padahal, keinginan DPR itu didasarkan pada kondisi bahwa gedung yang ada saat ini sudah tidak memadai," kata Taufik.

Sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR menyebutkan, Gedung Nusantara I yang dibangun sejak 1997 digunakan untuk ruangan kerja anggota DPR. Saat itu kapasitas bangunan diperkirakan menampung 800 orang. Namun, saat ini jumlah orang yang beraktivitas di gedung tersebut mencapai 5.000 orang setiap hari.

Hal senada diharapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Nas-

dem, Johnny G Plate. "Pembangunan gedung disesuaikan dengan kebutuhan anggota DPR. Jadi, jangan sampai berlebihan, apalagi sampai ada macam-macam," ujarnya.

Sulit dipahami

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai mulusnya anggaran pembangunan gedung baru DPR tak lepas dari keharmonisan relasi DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah merasa tak perlu mendengarkan lagi aspirasi publik yang menolak pembangunan gedung DPR. Padahal, anggaran pembangunan bisa digunakan untuk membantu ekonomi masyarakat.

"Restu pemerintah sesungguhnya sulit untuk bisa dipahami di tengah keterbatasan anggaran selama ini," kata Lucius. Namun, dengan dialokasikannya anggaran pembangunan gedung baru dalam APBN 2018, kontrol publik menjadi penting.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan, setelah selesai menetapkan detail alokasi anggaran berikut kegiatan, setiap kementerian dan lembaga negara selanjutnya melapor ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), awal Desember 2018.

(AGE/LAS/APA)